



PAPER – OPEN ACCESS

## Modal Sosial dan Mitigasi Bencana pada Masyarakat di Pulau Makasar Kota Baubau

Author : Tanzil dkk.,  
DOI : 10.32734/lwsa.v2i1.638  
Electronic ISSN : 2654-7066  
Print ISSN : 2654-7058

*Volume 2 Issue 3 – 2019 TALENTA Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Published under licence by TALENTA Publisher, Universitas Sumatera Utara



## Modal Sosial dan Mitigasi Bencana pada Masyarakat di Pulau Makasar Kota Baubau

*Social Capital and Disaster Mitigation in Communities on the Makassar City of Baubau City*

Tanzil<sup>a</sup>, Jamaluddin Hos<sup>b</sup>, Muhammad Arsyad<sup>c</sup>

<sup>a, b, c</sup> Dosen Tetap Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Halu Oleo

Email : tanzilsosio@gmail.com; jhos\_mard@yahoo.co.id, jamaluddin\_hos@uho.ac.id; muharsyad@gmail.com

### Abstract

*A community group generally poses knowledge about disaster mitigation that occurs in their area. It's the same thing for people on the island of Makassar, Baubau City, Southeast Sulawesi Province. Rediscovering socio-cultural capital related to disaster mitigation becomes urgent issue in the midst of various disasters that often hit various parties, such as tsunamis, earthquakes, landslides, floods, fires and so forth. This research was carried out on the island of Makassar in the city of Baubau, Southeast Sulawesi, with focus on research is aimed at describing the construction of local communities about social values in disaster mitigation. The study used a qualitative approach with data collection techniques are through interviews, observation and documentation. Data analysis was carried out in a descriptive-qualitative manner. The research subjects were determined by purposive sampling, which included community figures on the island of Makassar, and government officials. The results showed that the people on the island of Makassar had social values in disaster management: (1) the existence of collective action driven by the social values of *pobhinci-bhinciki kuli*, *pomae-maeka*, *pomaa-maasiaka*, *popia-piara*, and *poangka-angkataka*. (2) the existence of *tuturangiana andala* ritual of is a ritual that expresses the humble request of the community to the rulers of the sea to bestow sustenance and be kept away from disaster. This research acknowledged that social capital is a strength for people on the island of Makassar in mobilizing resources to deal with disasters.*

*Keywords: social capital, disaster mitigation, tuturangiana andala;*

### Abstrak

Suatu kelompok masyarakat pada umumnya memiliki pengetahuan tentang mitigasi bencana yang terjadi di daerahnya. Demikian halnya pada masyarakat di Pulau Makasar Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara. Menggali kembali modal sosial budaya terkait dengan mitigasi bencana menjadi sesuatu yang urgen di tengah-tengah berbagai bencana yang sering melanda berbagai pihak, seperti terjadinya tsunami, gempa bumi, tanah longsor, banjir, kebakaran dan lain sebagainya. Penelitian ini di laksanakan di Pulau Makasar kota Baubau Sulawesi Tenggara dengan fokus penelitian diarahkan untuk menggambarkan konsrtuksi masyarakat lokal tentang nilai-nilai sosial dalam mitigasi bencana. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Subyek penelitian ditentukan secara *purposive sampling*, yang meliputi tokoh masyarakat di Pulau Makasar, dan Aparat Pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Pulau Makasar memiliki nilai-nilai sosial dalam penanggulangan bencana: (1) adanya tindakan kolektif yang didorong nilai-nilai sosial *pobhinci-bhinciki kuli*, *pomae-maeka*, *pomaa-maasiaka*, *popia-piara*, dan *poangka-angkataka*. (2) adanya ritual *tuturangiana andala* yakni ritual ungkapan permohonan masyarakat kepada penguasa laut agar melimpahkan rezeki dan dijauhkan dari bencana. Penelitian ini melihat bahwa modal sosial tersebut menjadi kekuatan bagi masyarakat di Pulau Makasar dalam memobilisasi sumber daya untuk menghadapi bencana.

Kata Kunci: modal sosial, mitigasi bencana, tuturangiana andala;

### 1. Pendahuluan

Pengelolaan bencana berbasis komunitas[1] adalah salah satu pilar penting dalam upaya pengelolaan risiko bencana saat ini. Pengelolaan bencana berbasis komunitas umum diterima oleh kalangan ahli bencana karena selama ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan struktural/fisik semata dan fokus pada kedaruratan serta pendekatan yang *top-down* yang jarang memberikan hasil pada ranah pengurangan risiko bencana yang berkelanjutan. Pengelolaan bencana berbasis komunitas memberikan jawaban yang mencakup beberapa prinsip seperti efisiensi karena idealnya memiliki biaya transaksi rendah karena adanya asupan lokal maksimum dan asupan eksternal minimum.

Menurut Mukti dan Winana dalam Indiyanto & Kuswanjono[2], keswadayaan masyarakat merupakan komponen utama dalam sistem penanggulangan bencana di Indonesia. Penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana, sangat memerlukan peran masyarakat secara langsung. Dari

berbagai pengalaman penanggulangan bencana alam di berbagai daerah, keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh sejauh mana peran serta masyarakat dalam kegiatan tersebut.

Sudibyakto, Retnowati, Suryanti, dan Hisbaron dalam Indiyanto & Kuswanjono[3], menyatakan bahwa Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat (PBBM) dipahami sebagai upaya meningkatkan kapasitas masyarakat atau mengurangi kerentanan masyarakat, agar mampu menolong diri sendiri dan kelompoknya dalam menghadapi ancaman bahaya yang berpotensi menjadi bencana di sekitar kehidupannya. Manajemen kebencanaan berbasis masyarakat ini meliputi keseluruhan tahap yaitu pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan. Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat (PBBM) pada intinya merupakan sebuah pendekatan penanggulangan bencana yang berbasis pada komunitas lokal. Pendekatan ini pada dasarnya mensyaratkan adanya sikap politik yang memberikan keberpihakan kepada kepentingan komunitas lokal. Pendekatan ini juga menempatkan pengetahuan lokal (*local knowledge*) dan para jenius lokal (*local geniuses*) di latar depan. Dalam prakteknya, pendekatan ini mengakomodasi potensi dan modal sosial (*social capital*) yang ada di masyarakat sebagai sumber daya dalam melaksanakan program penanggulangan bencana. Sehingga, diharapkan masyarakat akan tanggap dan sadar bahwa mereka hidup di daerah rawan bencana, dan mempunyai kapasitas yang memadai dalam penanggulangan bencana. Proses pemberdayaan ini menghendaki adanya kemauan politik (*political will*) dari pemerintah untuk berperan sebagai fasilitator dalam rangka mendorong berkembangnya kelompok masyarakat sadar dan tanggap bencana.

Salah satu pendekatan alternatif adalah mengembangkan kebijakan manajemen bencana lewat konsultasi dengan kelompok-kelompok setempat dan menggunakan tehnik serta tindakan di mana masyarakat dapat mengorganisasi diri secara mandiri dengan bantuan teknis terbatas dari luar. Program manajemen bencana berbasis masyarakat tersebut dianggap lebih memungkinkan untuk melahirkan tindakan yang responsive terhadap kebutuhan komunitas, dan untuk mengambil bagian dalam pembangunan komunitas. Pendekatan ini juga cenderung memaksimalkan penggunaan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja, material dan organisasi. Praktek manajemen bencana yang berhasil harus melibatkan kerjasama antara komunitas dengan instansi yang terkait. Komunitas lokal harus sadar akan risiko dan peduli untuk melakukan tindakan untuk menghadapi risikonya. Masyarakat mungkin memerlukan bantuan teknis, bantuan materi dan bantuan dalam membangun kapabilitas-kapabilitas mereka sendiri[4].

Tujuan dari penelitian ini yakni menghasilkan formulasi penanggulangan bencana berbasis masyarakat di Pulau Makasar Kota Baubau. Dengan adanya formulasi ini diharapkan menjadi sumber rujukan bagi pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana terutama dilokasi penelitian.

Pengalaman dalam pelaksanaan penanggulangan bencana yang berorientasi pada kemandirian komunitas akan merujuk pada: (1) melakukan upaya pengurangan risiko bencana bersama komunitas di kawasan rawan bencana, agar selanjutnya komunitas mampu mengelola risiko bencana secara mandiri; (2) menghindari munculnya kerentanan baru dan ketergantungan komunitas di kawasan rawan bencana pada pihak luar; (3) penanggulangan risiko bencana merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam untuk keberlanjutan kehidupan komunitas di kawasan rawan bencana; (4) pendekatan multisektor, multidisiplin, dan multibudaya[5]

## 2. Landasan Teori

Coleman[6], menyatakan bahwa modal sosial yaitu kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama demi mencapai tujuan bersama dalam suatu kelompok dan organisasi. Bourdieu[7], modal sosial adalah sumber daya aktual atau maya yang berkumpul pada seorang individu atau kelompok karena memiliki jaringan tahan lama berupa hubungan timbal balik pengenalan dan pengakuan yang sedikit banyak terinstitusionalisasikan. Selanjutnya Putnam dalam Field[8], modal sosial adalah bagian dari kehidupan sosial (jaringan, norma dan kepercayaan) yang mendorong partisipan bertindak bersama secara efektif untuk mencapai tujuan-tujuan utama. Dari ketiga definisi tersebut dapat dipahami bahwa modal sosial adalah kemampuan masyarakat untuk saling memperkuat antara satu dengan yang lain yang dilakukan secara efektif dalam mewujudkan tujuan bersama.

Dalam konsep modal sosial terdapat unsur-unsur yang dipandang penting yakni (1) *trust* (kepercayaan). *Trust* atau rasa percaya (mempercayai) adalah suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung, paling tidak yang lain tidak akan bertindak merugikan diri dan kelompoknya[9], (2) *norms* (norm-norma). Coleman[10], memberikan penjelasan bahwa sebuah norma selalu “*specify what actions are regarded by a set of persons as proper or correct, or improper or incorrect*”, dengan kata lain sebuah norma menentukan apa yang baik dan apa yang buruk. Selanjutnya Coleman mengungkapkan, “*social capital requires investment in the designing of the structure of obligations and expectations, responsibility and authority, and norms (or rules) and sanctions which will bring about an effectively functioning organization*”, (3) *rules* (aturan-aturan). Menurut Coleman, “*social capital requires investment in the designing of the structure of obligations and expectations, responsibility and authority, and norms (or rules) and sanctions which will bring about an effectively functioning organization*”. Sedangkan menurut Putnam, di dalam setiap “peraturan” di sebuah komunitas, terkandung asas resiprokal (berbalasan) dan harapan (ekspektansi) tentang tindakan-tindakan yang patut dilakukan secara bersama-sama. Melalui peraturan-peraturan inilah setiap anggota

komunitas menata tindakannya, Ostrom dan Ahn menyatakan: “*Rules are the results of human beings’ efforts to establish order and increase predictability of social outcomes [...] therefore a rule of law, a democratic atmosphere, and a well-structured government (if these exist) are valuable social capital for any society*”. (4) *networks* (jaringan). Sebagaimana dikatakan Putnam[11], pemikiran dan teori tentang modal sosial memang didasarkan pada kenyataan bahwa “jaringan antara manusia” adalah bagian terpenting dari sebuah komunitas. Jaringan ini sama pentingnya dengan alat kerja (disebut juga modal fisik atau *physical capital*) atau pendidikan (disebut juga *human capital*). Secara bersama-sama, berbagai modal ini akan meningkatkan produktivitas dan efektivitas tindakan bersama.

Dalam perspektif sinergi modal sosial terdapat unsur-unsur yang menjadi komponen penting, yang menyertai pola kemitraan yaitu *bonding*, *bridging*, dan *linking*. Ketiga hal tersebut merupakan unsur dari pola kemitraan. Michael Woolcock mengembangkan kerangka kerja teori untuk menjelaskan betapa perbedaan yang ada dalam masyarakat dapat dibentuk oleh modal sosial yang ada di dalam masyarakat itu sendiri[12]. Sebagai contoh adalah dalam menggambarkan *bonding* yang ada di dalam sebuah masyarakat, dia menyamakan dengan *intra-communityties*, atau yang dia sebut sebagai *integration* dan modal sosial *bridging* yang dia samakan dengan *extra-community ties* atau yang disebut sebagai *linkage*. Woolcock melihat bagaimana sebuah komunitas dapat memiliki kombinasi bentuk ikatan yang berbeda-beda dalam sebuah masyarakat dengan bentuk komunitas yang berbeda-beda pula. Konsep *linking* yang dikemukakan oleh Woolcock, Szeter, dan lain-lain, memberikan penjelasan lebih luas mengenai jaringan individual atau komunitas masyarakat, dengan sumber dan kekuasaan yang tidak sama. Dengan adanya ikatan yang tidak dapat dipisahkan, *linking* dalam modal sosial melibatkan norma-norma saling menguntungkan, atau moral keadilan yang menyeimbangkan *self-interest* pada suatu kelompok, yang kaya akan sumber-sumber. Karenanya, *linking* dalam modal sosial dapat dilihat sebagai bentuk khusus dari *bridging* dalam modal sosial yang berfokus pada kekuasaan yang menjembatani kekuasaan dan sumber-sumber yang tidak setara secara vertikal.

Pola sinergi modal sosial dalam penanggulangan bencana adalah sebuah pola yang berupaya untuk menyatukan berbagai unsur modal sosial yang dimiliki masyarakat dengan maksud untuk mendorong keunggulan-keunggulan modal sosial tersebut untuk melakukan penanggulangan bencana agar dapat memobilisasi sumber daya yang ada.

### 3. Metode

Fokus penelitian diarahkan untuk menggambarkan konstruksi masyarakat lokal tentang nilai-nilai sosial dalam mitigasi bencana. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif-kualitatif. Subyek penelitian ditentukan secara *purposive sampling*, yang meliputi tokoh masyarakat di Pulau Makasar, dan Aparat Pemerintah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan, observasi, *focus group discussion*, dan studi dokumentasi. Analisa data dilakukan dengan teknik analisa yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yaitu meliputi reduksi data, *display* data, penyimpulan, dan verifikasi. Pengecekan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi dan diskusi dengan teman sejawat. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan beberapa kriteria, yaitu; (1) validitas, (2) transferabilitas, (4) dependabilitas, dan konfirmabilitas.

Kredibilitas yakni peneliti melakukan kegiatan yakni membina hubungan/*rapport* secara mendalam, membina hubungan yang akrab serta memiliki sensitivitas yang cukup kuat terhadap bahasa dan gaya hidup dilokasi penelitian. Transferabilitas yakni generalisasi diarahkan pada kasus-kasus yang menunjukkan kesesuaian konteks, bukan dalam kerangka prinsip acak seperti dalam penelitian kuantitatif. Dependabilitas yakni analisis data yang terstruktur dan berupaya menginterpretasikan hasil penelitian sehingga bagi peneliti yang lain akan dapat membuat kesimpulan yang sama dalam menggunakan perspektif dan dokumen analisis penelitian yang sedang dilakukan. Konfirmabilitas yakni langkah atau cara peneliti melakukan konfirmasi hasil penelitian pada *peer review*, jurnal terkait, konsultasi dengan peneliti lain untuk mendapatkan masukan demi kesempurnaan hasil penelitian.

### 4. Modal sosial Masyarakat di Pulau Makasar

Pulau Makasar yang menjadi tempat pelaksanaan studi ini masuk dalam wilayah administratif Kota Baubau Propinsi Sulawesi Tenggara. Pulau Makasar adalah sebuah pulau kecil dengan luas 133 ha. Tingginya pertumbuhan penduduk di Pulau Makasar yang tidak diiringi pembukaan lapangan pekerjaan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) telah menimbulkan berbagai dampak negatif seperti daya dukung lingkungan yang rendah yang tentu saja akan menimbulkan kerentanan yang tinggi terhadap bencana. Dalam berbagai kasus bencana yang terjadi di Pulau Makasar seperti kebakaran, angin kencang, serta konflik sosial, tidak dapat diprediksi yang mengharuskan adanya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dengan membentuk suatu mekanisme secara terintegrasi dari pemerintah dan masyarakat. Dalam menghadapi bencana tentu saja selain memaksimalkan penyediaan *hardware* (berbagai perangkat keras dalam menghadapi bencana) juga harus didukung dengan perangkat lunak (*software*) antara lain berupa modal sosial dalam menghadapi bencana.

#### 4.1. Ritual *Tuturangiana Andala*

Ritual *tuturangiana andala* adalah ritual yang dilakukan oleh masyarakat nelayan di Pulau Makasar yang diwarisi secara turun menurun dan dipercaya bila tidak dilaksanakan akan menimbulkan bencana yang akan menimpa masyarakat di Pulau Makasar (Wawancara Ahmat, 2018). *tuturangiana andala* yang memiliki arti memberi sesuatu berupa sesaji kepada penjaga laut, agar tidak terjadi bencana dan laut akan mendatangkan manfaat kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, ritual *tuturangiana andala* dalam pelaksanaannya di pimpin oleh seorang pemuka adat yang biasa disebut *lebe*. Pertama *lebe* akan melakukan tradisi '*batata*' (pembacaan doa) yang ditujukan pada empat lokasi di laut yang dianggap keramat oleh masyarakat di Pulau Makasar. Mereka meyakini, keempat tempat tersebut merupakan tempat bersemayamnya pejangga Pulau Makasar dari bencana. Disamping melakukan tradisi '*batata*' masyarakat juga mempersiapkan *pakandea* (makanan) sebagai sesaji pada empat lokasi yang dianggap keramat. Isi sesaji adalah *tabako* (rokok), *tawana gili* (daun siri), *pagana* (buah pinang), dan *tagambiri* (gambir). Selain itu disediakan pula sejumlah makanan tradisional masyarakat Buton seperti Cucur, Wajik, Epu-epu, Onde-onde, Lapa-lapa, dan Telur Ayam Kampung. Dalam ritual *tuturangiana andala* juga dipersiapkan sebuah wadah yang terbuat dari Bambu yang dibentuk persegi empat yang biasa disebut *jangkara* (tempat untuk menyimpan sesaji). Selain itu dalam wadah yang telah dibuat juga ada sesaji berupa darah Kambing Jantan yang dimasukkan dalam sebuah Gelas yang terbuat dari Bambu. Kambing tersebut biasa disebut oleh masyarakat dengan qurban.

Sesaji yang telah dibuat kemudian diarak keempat tempat di laut yang dianggap keramat karena dipercaya memiliki penghuni yang menjaga wilayah perairan Pulau Makasar. Ritual *tuturangiana andala* sampai saat ini masih tetap terpelihara, bahkan Pemerintah Kota Baubau menjadikannya sebagai salah satu obyek wisata yang dilaksanakan setiap tahun. Seorang tokoh masyarakat Armudin mengatakan ritual *tuturangiana andala*, sudah hampir punah, hal ini disebabkan semakin meningkatnya pemahaman masyarakat bahwa sesungguhnya hanya Allah Subhanahu Wa ta'ala satu-satunya pemberi rezeki, dan hanya Allah sajalah yang menggerakkan semua kekuatan di alam fana ini.

Namun demikian tradisi tersebut menggambarkan bahwa masyarakat di Pulau Makasar berupaya untuk hidup berdampingan dengan alam secara harmonis. Sejalan dengan Nababan[13], masyarakat memiliki prinsip-prinsip konservasi dalam pengelolaan sumber daya alam secara tradisional. Rasa hormat yang mendorong keselarasan (harmoni) hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Dalam hal ini masyarakat tradisional lebih condong memandang dirinya sebagai bagian dari alam itu sendiri. Rasa memiliki yang eksklusif bagi komunitas atas suatu kawasan atau jenis sumberdaya alam tertentu sebagai hak kepemilikan bersama (*communal property resource*). Rasa memiliki ini mengikat semua warga untuk menjaga dan mengamankan sumberdaya bersama dari kerusakan.

Oleh karena itu, ritual *tuturangiana andala* seperti telah diuraikan terbukti telah bermanfaat bagi masyarakat di Pulau Makasar dalam menjaga kelestarian alam dan menghindari pemanfaatan sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan.

#### 4.2. Nilai-nilai Sosial dan Spritual

Turi[14] mengemukakan masyarakat Buton Sulawesi Tenggara, sejak dulu telah mempraktekkan sistem nilai dan falsafah hidup *bhinci-bhinciki kuli* yang mengajarkan setiap manusia dalam hidup bermasyarakat perlu melakukan empat perilaku dasar (*sara pataanguna*) yaitu saling menyayangi (*po maa maasiaka*), saling menghormati (*po angka-angkataka*), saling takut-menakuti (*po mae-maeka*), dan saling memelihara dengan sesama (*po pia piara*). Selanjutnya Alwasilah[15]. Setiap masyarakat berusaha mentransmisikan gagasan fundamental yang berkenaan dengan hakekat dunia, pengetahuan dan nilai-nilai. Nilai-nilai budaya lokal memiliki keunggulan sebagai seperangkat keyakinan dan perilaku bagi masyarakat.

Sejak masuknya agama Islam di Buton yakni sekitar tahun 815H/1412 M kemudian melahirkan "akulturasi budaya", antara budaya lokal dan Islam. Perkembangannya ialah budaya lokal yang sejalan dengan ajaran Islam hidup dan menjadi prinsip-prinsip hidup bagi masyarakat di Buton dan tidak terkecuali di Pulau Makasar. Seperti dikatakan Melamba[16] bahwa budaya-budaya lokal yang ada di masyarakat, tidak otomatis hilang dengan kehadiran Islam. Budaya-budaya lokal ini sebagian terus dikembangkan dengan mendapat warna-warna Islam.

Pengaruh Islam di Pulau Makasar sangat kuat, dan masyarakat memiliki konstruksi nilai-nilai sosial yang bersumber dari ajaran Islam misalnya dalam Q.S. Al-Baqarah 213 yang menyebutkan bahwa "manusia adalah umat yang satu" kemudian melahirkan nilai-nilai sosial "*poromu inda sangu, pogaa inda kolotaa* (berkumpul tidak bersatu, bercerai tidak berantara). Prinsip ini mengajarkan bahwa hubungan silaturrahim antara sesama umat manusia harus dibangun karena umat manusia dianalogikan sebagai bingkai rumah tangga yang saling menyatu berdasar prinsip kekeluargaan. Saat ini prinsip-prinsip tersebut di atas menjadi semakin menguat dalam masyarakat yang diringi dengan bangkitnya kepedulian sosial dan kepercayaan, dimana orang-orang yang mampu dan memiliki sumber daya ekonomi yang cukup akan membantu sesamanya yang kekurangan sementara yang lainnya akan ikut menyediakan jasa tenaga.

Timbulnya kerjasama dalam menangani bencana dapat dipahami tidak muncul begitu saja namun dikembangkan berdasarkan nilai-nilai sosial yang mereka yakini bersama. Selanjutnya mereka memiliki serangkaian pola interaksi yang mengatur kewajiban masing-masing. Sering terlihat Pelibatan Masjid dan pimpinan tradisional lokal dalam mengurangi dampak bencana. Mereka beranggapan bahwa peningkatan peran Masjid dalam penanggulangan bencana adalah hal yang wajar. Sejalan dengan

Fukuyama[17] bahwa etika kerja, sikap kekeluargaan dan gotong royong, ajaran agama dan sifat-sifat moral yang tertanam kuat merupakan unsur-unsur strategis yang dapat melecut pembangunan masyarakat.

#### 4.3. Pola Sinergi dalam Penanggulangan Bencana

Belajar dari bencana yang terjadi di beberapa daerah di tanah air dimana akibat bencana menyebabkan aktifitas kehidupan masyarakat menjadi lumpuh, sehingga diperlukan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Oleh karena itu semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat secara bersama sama melakukan upaya penanggulangan bencana. BNPB memasukan kegagalan teknologi, kebakaran, aksi teror dan sabotase, serta kerusuhan sosial sebagai bencana. Keberhasilan penanggulangan bencana menurut Paidi<sup>18</sup> [18] juga ditentukan koordinasi LSM atau NGO dengan para relawan maupun pemerintah dalam skenario penanggulangan pasca bencana melalui kegiatan-kegiatan nyata bergantung kepada orang-orang dan komunitas. Keterlibatan masyarakat merupakan hal yang penting, karena kegiatan komunitas berakar sangat dalam pada masyarakat dan budaya di sebuah wilayah. Munculnya partisipasi masyarakat, dalam grup-grup masyarakat, merupakan bentuk *grup grassroot* yang berperan penting dalam sistem manajemen risiko bencana.

Untuk itu, pola sinergi dalam penanggulangan bencana berbasis modal sosial perlu dilakukan sehingga dalam penanganan bencana merupakan aktivitas yang saling memperkuat. Pendekatan penanggulangan bencana ini sesuai kerangka berfikir Woolcock mengintegrasikan *bonding social capital*, *bridging social capital*, dan *linking social capital*. Woolcock mengembangkan model jaringan sosial yang bersifat *bottom up* dan *top down*. Model jaringan bersifat *bottom up* adalah integrasi (*integration*) dan jejaring (*linkage*). Integrasi merujuk pada ikatan dalam komunitas itu sendiri sedangkan jejaring merujuk pada tingkat jangkauan komunitas berhubungan dengan keberadaan sumber daya sosial yang berasal dari luar komunitasnya. Untuk kepentingan di atas, dalam masyarakat di Pulau Makasar dapat mendorong para pemimpin lokal dan para pengurus masjid untuk bisa terlibat dalam aktivitas kemanusiaan. Model jaringan sosial berifat *top down* yaitu sinergi jaringan eksternal kelompok-kelompok sosial di tingkat atas antara pemerintah, NGO dan lembaga lainnya. Hasil akhirnya diharapkan adalah munculnya sinergitas antara masyarakat dengan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga penanggulangan bencana memiliki akar kuat sampai pada masyarakat.



Gambar 1. Pola sinergi dalam penanggulangan bencana

## 5. Penutup

Masyarakat di Pulau Makasar memiliki nilai-nilai sosial dalam penanggulangan bencana: (1) adanya tindakan kolektif yang didorong nilai-nilai sosial *pobhinci-bhinciki kuli*, *pomae-maeka*, *pomaa-maasiaka*, *popia-piara*, dan *poangka-angkataka*. (2) adanya ritual *tuturangiana andala* yakni ritual ungkapan permohonan masyarakat kepada penguasa laut agar melimpahkan rezeki dan dijauhkan dari bencana. Penelitian ini melihat bahwa modal sosial tersebut menjadi kekuatan bagi masyarakat di Pulau Makasar dalam memobilisasi sumber daya untuk menghadapi bencana. Untuk itu, pola sinergi dalam penanggulangan

bencana berbasis modal sosial perlu diperkuat sehingga dalam penanganan bencana merupakan aktivitas yang saling memperkuat.

## Referensi

- [1] Paripurno, dkk. 2018. Panduan Pengelolaan Resiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK). Deepublish. Yogyakarta.
- [2] Indiyanto, A & Kuswanjono, A. 2012. Konstruksi Masyarakat Tangguh Bencana. Bandung: Mizan.
- [3] Indiyanto, A & Kuswanjono, A. 2012. Konstruksi Masyarakat Tangguh Bencana. Bandung: Mizan.
- [4] Handayani, R. 2011. *Analisis Partisipasi Masyarakat Dan Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Manajemen Bencana Di Kabupaten Serang Provinsi Banten*. Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah. Serang, Jawa Barat.
- [5] Paripurno, Eko Teguh. 2006. *Penanggulangan Bencana oleh Komunitas*. Yogyakarta: Pusat Studi Manajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta.
- [6] Coleman, J. C. 1994. *Foundations of Social Theory*, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- [7] Bourdieu, P. 1983. *Forms of capital* in J. C. Richards (ed.) *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, New York: Greenwood Press.
- [8] Field, J. 2003, *Social Capital*, London: Routledge. 166 + vi pages. One of the best overviews and introductions to social capital.
- [9] Putnam, R. D. 1995. Bowling Alone: America's Declining Sosial Capital. *Jurnal of Democracy*, 6:65-78.
- [10] Coleman, J. C. 1990. 1994, *Foundations of Social Theory*, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- [11] Putnam, R. D. 1995. Bowling Alone: America's Declining Sosial Capital. *Jurnal of Democracy*, 6:65-78.
- [12] Woolcock, Michael. 1998. *Social Capital And Economic Development: Towards a Theoretical Synthesis And Policy Framework*. *Theory and Society*, 27: 151-208.
- [13] Nababan, 1995. Kearifan Tradisional dan Pelestarian Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Analisis CSIS : Kebudayaan, Kearifan Tradisional dan Pelestarian Lingkungan*. Tahun XXIV No. 6 Tahun 1995.
- [14] Turi, La Ode. 2007. Esensi Kepemimpinan Bhinci-Bhinciki Kuli Suatu Tinjauan Budaya Kepemimpinan Lokal Nusantara. Kendari. Khazanah Nusantara.
- [15] Alwasiah, A. Chaedar. 2009. *Etnopedagogi Landasan Praktek Pendidikan dan Pendidikan Guru*, Bandung .Kiblat.
- [16] Melamba, Basri. 2012. Interaksi Islam dengan Budaya barasandi dan Aktivitas Sosial Keagamaan Orang Tolaki di Sulawesi Tenggara, *Jurnal el Harakah* Vol.14 No.2 Tahun 2012.
- [17] Fukuyama, Francis. 2002. *Social Capital and Development: The Coming Agenda*. *SAIS Review* 22.1 23-37.
- [18] Paidi. 2012. *Jurnal Widya*. STIE Dharma Bumiputera, Jakarta, Tahun 29 Nomor 321 Juli - Agustus 2012